

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2023 mencapai 9,36% dari total penduduk Indonesia. Fenomena kemiskinan di Indonesia merupakan masalah penting yang melanda negara ini baik di tingkat pusat maupun di daerah.¹ Usaha-usaha pembangunan yang sedang giat dilaksanakan oleh negara-negara yang sedang berkembang di dunia pada umumnya berorientasi kepada bagaimana memperbaiki atau mengangkat taraf hidup (*level of living*) masyarakat di negara-negara tersebut agar mereka bisa hidup seperti masyarakat di negara maju (*developed countries*). Pembangunan ekonomi merupakan salah satu jawaban yang akan menjadi kunci keberhasilan bagi suatu negara untuk meningkatkan taraf hidup warga negaranya, pembangunan ekonomi selalu berkaitan terutama dengan efisiensi dan alokasi sumber produktif yang langka dengan pertumbuhan yang optimal untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih besar.²

Indonesia telah membawa kemajuan secara umum dan memberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat dalam beberapa aspek

¹ Badan Pusat Statistik, [materi-presentasi-berita-resmi-statistika-brs-bps-provinsi-riau-tanggal-1-desember-2022-63916f112f668-63916f112f66e.pdf](#)

² Suryana, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm. 2.

kehidupan. Tetapi pencapaian pembangunan tersebut belum merata dan belum dinikmati oleh seluruh masyarakat terutama yang masih berada dibawah garis kemiskinan. Dampak sosial ekonomi yang meliputi tingkat pengangguran yang tinggi, peningkatan angka penduduk miskin, rusaknya struktur sosial yang disebabkan kehilangan pekerjaan dan hilangnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok serta ancaman terhadap kerusakan sosial yang mengarah pada kriminal sangat mengganggu laju pertumbuhan perekonomian juga masa depan Indonesia.³

Prioritas utama pemberdayaan masyarakat miskin adalah pengetahuan, keterampilan, dan motivasi (modal manusia). Pendidikan merupakan ramuan utama dalam pengurangan kemiskinan. Dengan pendidikan itu masyarakat miskin menjadi produktif yang mengantarkan pada perolehan dan peningkatan pendapatan. Menurut Bank Dunia pendidikan menjadi sentral bagi pembangunan dan sebuah kunci mencapai tujuan Pembangunan Milenium yang menempatkan pendidikan dasar dalam tujuan pengurangan kemiskinan untuk tindakan yang disepakati bersama selama beberapa tahun mendatang. Pendidikan merupakan faktor paling efektif untuk mengurangi masyarakat miskin, yang memungkinkan mereka mampu mengkreasi dunia secara produktif, mandiri, dan berkelanjutan.⁴

³ <https://portal.merauke.go.id/news/6793/dampak-kemiskinan-mempengaruhi-banyak-hal.html>

⁴Rulam Ahmadi, "Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Pendekatan Modal Manusia"*Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 10, No, 2, 2012, hlm. 16-31.

wilayah pedesaan mengalami penurunan sebanyak 262,1 ribu jiwa (dari 15,81 juta jiwa pada Maret 2018 menjadi 15,54 juta jiwa pada September 2018). Pada September 2018, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp.410.670 per kapita per bulan, dengan komposisi garis kemiskinan pangan sebesar Rp.302.022 (73,54%) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp108.648 (26,46%). Pada bulan September 2018, rumah tangga miskin di Indonesia rata-rata berjumlah 4,63 rumah tangga. Dengan demikian, garis kemiskinan per rumah tangga miskin rata-rata sebesar Rp1.901.402 per rumah tangga miskin per bulan. Berdasarkan informasi tersebut, dapat dipastikan bahwa jumlah penduduk miskin di pedesaan lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk miskin di perkotaan. Keadaan ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di pedesaan.⁵

Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Kabupaten Mojokerto pada bulan Maret 2023 mencapai 112,86 ribu jiwa. Jumlah ini bertambah sebesar 1,83 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 yang sebesar 111,03 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto juga mengalami kenaikan dari 9,71 persen pada bulan Maret 2022 menjadi sebesar 9,80 persen pada bulan Maret 2023. Garis

⁵Badan statistik,"Presentase Penduduk Miskin September 2022
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html>.

Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto pada bulan Maret 2023 sebesar Rp486.520,00 per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp40.912,00 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 9,18 persen, bila dibandingkan kondisi bulan Maret 2022 yang sebesar Rp445.608,00. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Mojokerto Maret 2023 sebesar 0,73 mengalami peningkatan sebesar 0,36 poin dibandingkan Maret 2022 yaitu 0,37. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Mojokerto Maret 2023 sebesar 0,40 mengalami peningkatan sebesar 0,11 poin dibandingkan Maret 2022 yaitu 0,29.⁶

Salah satu penyebab terjadinya kemiskinan di desa adalah perpindahan penduduk desa ke kota, sehingga berdampak pada berkurangnya lapangan kerja di desa.⁷ Pembangunan pedesaan yang tidak merata menjadi penyebab utama terjadinya urbanisasi masyarakat sepanjang zaman. Faktanya, perpindahan penduduk meningkat dari 2012 51.28% dan 2022 57.93% banyak orang terpelajar yang lebih tertarik ke kota dan meninggalkan kampung halamannya.⁸ Inilah permasalahan desa terlantar, masyarakat yang mempunyai skil lebih memilih bekerja di kota karena mempunyai peluang yang lebih baik dan menjadikan desa sepi dan kurang produktif.⁹

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto (Statistics of Mojokerto Regency).

⁷ Deliarinov, (*perkembangan pemikiran ekonomi*) edisi revisi, (Jakarta, RajaGrafindo persada, 2003)

⁸ <https://www.statista.com/statistics/455835/urbanization-in-indonesia/>

⁹ Fitra Ayuningtyas Hidayatullah, Tri Suminar, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Candi Plaosan Melalui Program Desa Wisata Untuk Kemandirian Ekonomi

Salah satu penyebab kemiskinan dan pengangguran ialah adanya ketidak seimbangan di dalam perekonomian yang ada di daerah tertentu, banyaknya seseorang yang menimbun harta kekayaan tanpa adanya pengelokasian yang baik. Permasalahan kemiskinan bukanlah hal yang mudah bahkan menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat Indonesia, untuk diselesaikan seperti halnya membalikan telapak tangan.

Keberadaan industri pariwisata yang banyak dimanfaatkan di berbagai daerah menjadi penopang utama perekonomian. Industri yang kini diminati masyarakat ini telah membawa banyak manfaat dan prestasi hingga ke berbagai pelosok. Hanya sedikit negara yang menjadikan pariwisata sebagai sumber utama mata uang regional. Salah satu daerah bahkan menjadi desa terpopuler di Indonesia, merupakan salah satu produk terbaik desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, desa mandiri dan juga desa koperasi. Berbagai aspek industri pariwisata tidak hanya memberikan nilai tambah, memasarkan destinasi pariwisata, namun juga dianggap dapat meningkatkan perekonomian demi kesejahteraan masyarakat. Tentu saja hal ini tidak hanya terjadi secara besar-besaran, namun beberapa daerah yang ada di Indonesia memanfaatkan industri pariwisata untuk meningkatkan pendapatan daerahnya.

Kehadiran industri pariwisata di suatu daerah juga mendorong pariwisata lokal yang sesuai dengan letak geografis dan geoekonomi serta ditargetkan secara strategis sebagai daya tarik wisata serta menarik banyak orang dan menarik minat wisatawan, yang biasanya dianggap sebagai desa. Di sisi lain, pariwisata selalu menjadi kebutuhan masyarakat dan tidak terbatas. Perkembangan teknologi membuka akses mudah terhadap kegiatan pariwisata bagi seluruh masyarakat. Proses pemasaran dan pengelolaannya juga menggunakan teknologi dan media sosial seperti TikTok, Facebook, Instagram, dan Twitter agar mudah diakses oleh semua kalangan, terutama remaja yang menyukai euforia dan wisata alam. Hal ini membuat pariwisata semakin berkembang dan tawaran wisatanya bervariasi.

Pemandangan alam Indonesia mempunyai potensi wisata yang indah, didukung dengan kondisi alam yang indah sehingga memberikan pemerataan bagi perkembangan industri pariwisata. Letak geografis, kekayaan flora dan fauna memberikan akses yang luas kepada seluruh pemandu wisata. Banyak konsep yang diajukan dalam proses pengembangan, tergantung pada arah, tujuan dan keselarasan subyek dalam pelaksanaannya. Salah satu konsep yang banyak digunakan dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas adalah pariwisata berbasis komunitas. Konsep ini biasanya dikembangkan dalam skala kecil dan melibatkan interaksi antara pengunjung dan pengelola, cocok untuk pengembangan pariwisata lokal. Pariwisata berbasis komunitas juga

banyak digunakan dalam program pemberdayaan masyarakat di beberapa daerah. Komunikasi antara pengunjung dan pemandu juga harus selalu baik, karena jika berbicara tentang wisata buatan, harus banyak masukan, kritik dan sehingga dapat menarik minat wisatawan untuk semua kalangan.¹⁰

Berdasarkan UU Desa No.6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa desa mempunyai hak asasi manusia dan hak tradisional untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat serta berperan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang diturunkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berdasarkan perjalanan ketatanegaraan negara republik Indonesia.¹¹ Republik Desa di Indonesia telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga harus dilindungi dan diperkuat agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis, sehingga dapat menjadi landasan yang kokoh bagi terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Kenyataannya masih banyak desa yang jauh dari jaminan dalam UU Desa, masih banyak desa yang dikatakan terbelakang dalam pembangunan, pendidikan, dan teknologi sehingga jaminan sangat diperlukan untuk menciptakan kesejahteraan dan desa mandiri sesuai UU Desa No.6 Tahun 2014.

¹⁰ Asih Soenarih , Budi Sri Fitria Alhumaira, Dita Aprilia S , Dharma Saputra, "Strategi Dan Aspek Keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Desa Wisata Kersik", Vol. 2 No. 1, 2021. Hlm. 45 – 57.

¹¹ Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang desa

Dalam mewujudkan UU Desa No.6 Tahun 2014 sebagai salah satu langkah kongkrit yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan potensi alam dan potensi sumber daya manusia yang ada di desa itu sendiri seperti misalnya menjadikan desa sebagai destinasi pariwisata. Menurut Oka A Yati prospek industri pariwisata di Indonesia sangat besar dan menggembirakan mengingat pariwisata dianggap sebagai penyelamat, primadona, penghasil devisa bagi negara.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan pariwisata. Pertama, wilayah perdesaan memiliki potensi alam dan budaya yang relatif lebih otentik dibandingkan wilayah perkotaan, masyarakat perdesaan masih mempunyai tradisi budaya dan topografi serta ritual yang cukup harmonis. Kedua, lingkungan fisik di perdesaan relatif tidak terpengaruh atau kurang tercemar oleh berbagai jenis polusi dibandingkan di perkotaan. Ketiga, perkembangan ekonomi pedesaan sampai batas tertentu relatif lambat, sehingga pemanfaatan potensi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat lokal secara optimal merupakan alasan yang masuk akal untuk dikembangkannya pariwisata pedesaan.

Tidak hanya terbatas pada pengembangan desa wisata saja, namun dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti keberadaan lembaga pendidikan yang dapat mengarahkan masyarakat setempat untuk memulai usaha kecil-kecilan hingga menciptakan usaha baru, bisnis kreatif, inovasi dan beradaptasi dengan lingkungan. Kebutuhan yang harus dipenuhi agar masyarakat peka terhadap kebutuhannya. Sedikit banyaknya dapat

meringankan beban mereka dalam menjalankan tugasnya sebagai guru dan peserta pelatihan, seperti penyediaan printer dan mesin fotocopy yang sederhana namun jika lebih berkembang memenuhi kebutuhan perekonomian khususnya keluarga dapat meningkat, biasanya untuk meringankan beban negara dan berkembang menjadi masyarakat kreatif yang mandiri dengan banyak hal baru. Inovasi dan produksinya nantinya dapat dijadikan bahan evaluasi bagi masyarakat lain, sehingga menimbulkan refleksi dan motivasi bahwa keberadaan lembaga pendidikan turut membantu mengurangi kelemahan ekonomi.

Desa kembang belor merupakan salah satu desa berpotensi mejandi desa wisata yang didukung dengan adanya lembaga pendidikan salah satunya pondok pesantren itu bisa membuat masyarakat sekitar menjadi sejahtera, dengan kebijakan yang ada di dalam lembaga tersebut dan mampu berkolaboratif dengan pemerintahan desa, sehingga dapat merata dan tidak ada kesenjangan sosial di antara masyarakat dengan lembaga tersebut. Disini peran pemerintahan di tingkat desa sangat dibutuhkan untuk mengalokasikan suatu jobdes tertentu. Banyak masyarakat Desa Kembang Belor kurang lebih sekitar 300 ibu rumah tangga disetiap dusun yang memang mendapatkan bagian untuk meloundry pakaian dari santri Pondok Pesantren Amanatul Ummah, yang memang di koordinatori langsung oleh bu lurah kembang belor, bukan hanya itu saja dampak keberadaan pondok pesantren sangat memajukan ekonomi masyarakat Desa Kembang Belor. Oleh karena itu pemerintahan

desa beserta aparaturnya yang ada sangat dibutuhkan peran nya sehingga dapat bekerja sama dengan pihak lembaga pondok pesantren tersebut.

Pada tahun 2014 awal mula adanya pembagian laundry itu berawal dari banyak nya limbah yang ada di pondok pesantren, sehingga membuat warga desa mengalami keresahan dan akhirnya pemerintahan desa mencari solusi dan jalan alternatif agar tidak ada pencemaran lingkungan. Solusi yang ditawarkan adalah dengan adanya pembagian laundry tersebut sehingga dapat mengakomodir limbah sampah dan juga difasilitasi oleh pondok dengan kesepakatan yang telah ditentukan.

Sebelum menjadi wisata buatan terfavorit banyak warga yang memang tidak percaya terhadap investasi ini, karena memang di awal pembuatan wisata banyak yang meragukan sehingga kurang nya kepercayaan dari warga sehingga dapat menghambat adanya pembiayaan untuk pembangunan wisata tersebut. Tetapi disisi lain memang ada beberapa tokoh masyarakat yang memang optimis dan terus berjuang untuk membangun wisata tersebut yang memang diinginkan hanya beberapa orang saja, oleh karena itu sangat di apresiasi bagaimana tokoh masyarakat tersebut bisa memobilisasi masa sehingga pembangunan dan kepercayaan masyarakat dengan adanya investasi melalui akad musyawarah ini dapat berjalan sesuai yang diinginkan serta tujuan yang telah disepakati.

Tidak hanya akad musyarakah yang memang dipakai, tetapi mudharabah pun di lakukan oleh warga desa kembang belor dengan berinvestasi karena sependek pemahaman peneliti mudharabah adalah suatu akad perjanjian yang mana kerja sama antara pemilik harta atau modal dengan pengelola harta itu sendiri, tetapi konteks nya disini pengelola harta tersebut adalah wisata jadi semua harta yang dimiliki oleh pemodal itu di kelola oleh wisata untuk membuat wahana atau pun dibuat bisnis oleh wisata sehingga bisa menjadikan sebuah penghasilan dan keuntungan. Keuntungan tersebut dibagi kepada pemilik modal juga kepada wisata itu sendiri secara berkelanjutan dengan perjanjian yang sudah disepakati diawal.

Di dalam pengelolaan tersebut tidak hanya untuk pembangunan wisata untuk dijadikan sebuah wahana baru saja, tetapi ada beberapa saham yang memang itu di khususkan misalkan dari si pemilik modal tersebut mempunyai sebuah permainan atau alat yang memang layak dan banyak peminat nya bagi pengunjung itu pun di perbolehkan karena memang regulasi dan tujuan yang dibuat di wisata itu adalah untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di desa kembang belor.

Berbagai cara dan upaya agar masyarakat percaya dengan adanya saham tersebut awal nya sangat lah susah. Dari tahun 2019 awal mula wisata ini berdiri hingga saat ini perjalanan yang dirasa singkat tetapi poerkembangannya sangat pesat, pak muktar selaku kepala desa kembang belor berpendapat bahwasanya jarang ada wisata yang memang modal

awal nya murni dari dana masyarakat setempat, kebanyakan dari para investor-investor yang mempunyai modal besar yang hanya untuk mementingkan dan memperkaya dirinya sendiri tanpa memikirkan masyarakat lain nya.

Unik nya disini memang bener-bener murni uang, dana atau modal dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat, bahkan dana desa pun tidak ikut terlibat di dalam pengelolaan wanawisata ini. Karena yang diinginkan oleh kepala desa itu adalah kesejahteraan masyarakat setempat dan mengurangi adanya ketimpangan sosial juga kemiskina, oleh karena itu salah satu solusi nya yang di suguhkan oleh desa adalah dengan pemerataan saham tersebut sehingga masyarakat yang kurang mampu saja bisa berinvestasi dan bisa membeli saham tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah mempunyai peran penting dalam memetakan potensi pengembangan pariwisata dan membentuk kebijakan, sehingga timbul kesadaran pada masyarakat lokal untuk menggali potensi tersebut dan bergerak menuju pengembangan desa dan kota. Strategi yang tumbuh dan menjadi pemangku kepentingan adalah strategi pengembangan desa wisata melalui pemberdayaan masyarakat. Menurut Alfred Chandler, strategi adalah sarana untuk mencapai tujuan perusahaan

dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program pemantauan, dan prioritas alokasi sumber daya.¹²

Hadirnya program pemberdayaan desa didalam suatu daerah diharapkan menjadi solusi yang baik dalam kesejahteraan masyarakat dan juga dapat memberi solusi atas hambatan-hambatan yang terjadi disuatu desa dalam peengentasan kemiskinan juga pengangguran. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“STRATEGI PENGEMBANGAN DESA WISATA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (DESA KEMBANG BELOR)”**

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah di paparkan dalam latar belakang di atas maka pokok permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana Strategi Pengembangan Desa Wisata dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Kembang Belor Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana Pelaksanaan Program Pengembangan Desa Wisata Dalam Meningkatkan Ekonomi masyarakat di Desa Kembang Belor Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto?

¹² Husein Umar, *Desain Penelitian Manajemen Strategik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.16-17

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang sesuai dengan permasalahan yang di angkat oleh penulis antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Pengembangan Desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Kembang Belor Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mengetahui dan menemukan bagaimana strategi Pengembangan Desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat perspektif ekonomi islam di Desa Kembang Belor Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh penelitian ini semoga dapat berguna baik secara teoritis ataupun peraktis, manfaat yang di peroleh di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi juga masukan sebagai upaya menambah khazanah keilmuan terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan upaya pengembangan dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

2. Manfaat secara praktis

Adapun manfaat penelitian secara praktis di antaranya yakni sebagai berikut:

- a. Besar harapan penulis penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum nya bagi masyarakat, khusus nya untuk peneliti sendiri.
- b. Mampu memperkaya pengetahuan dan pemikiran tentang peran desa dalam pemberdayaan dan pengembangan dalam upaya peningkatan ekonomi di masyarakat.



UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto